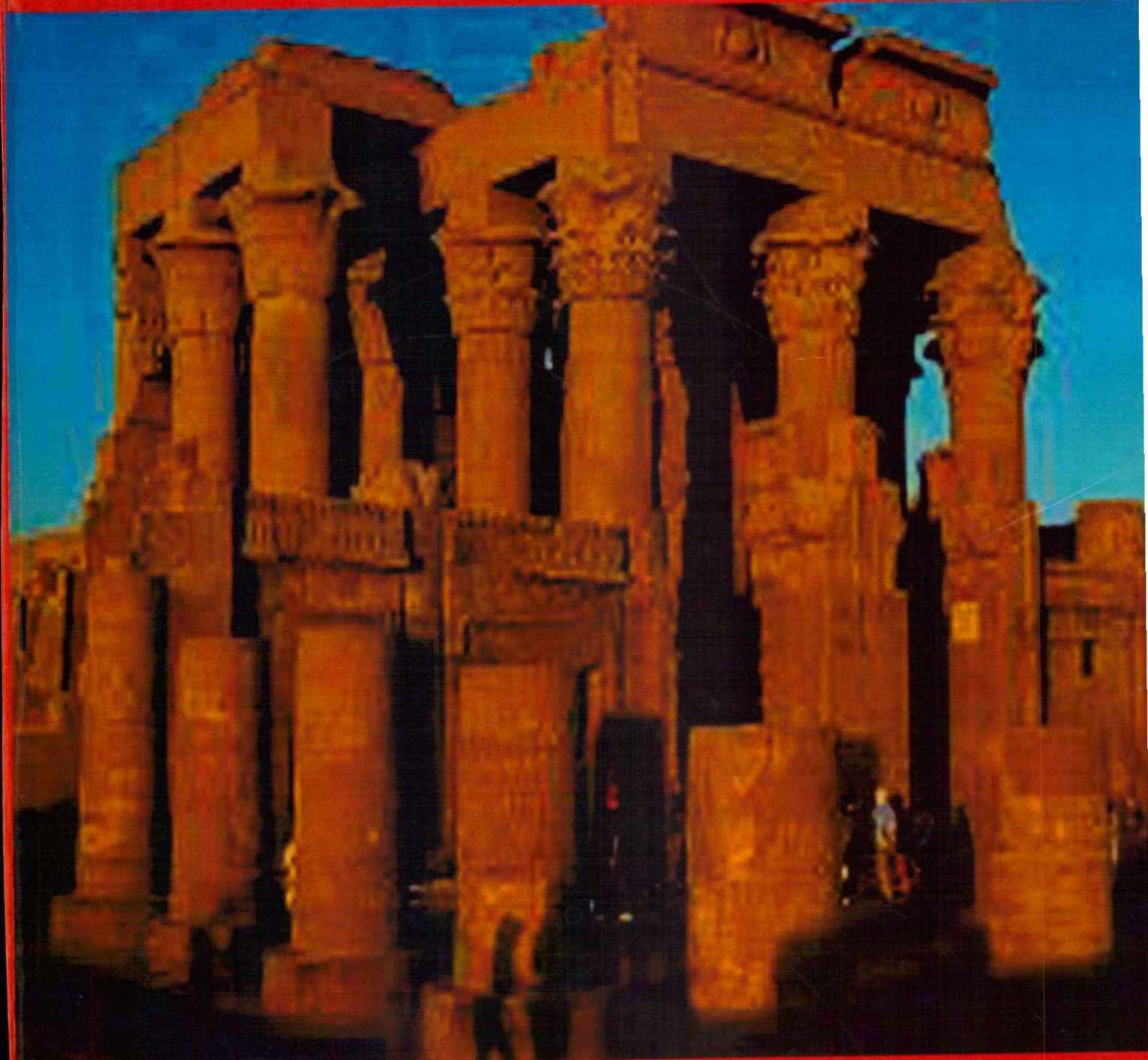


Volume III , No. 2 Juli-Desember 2019

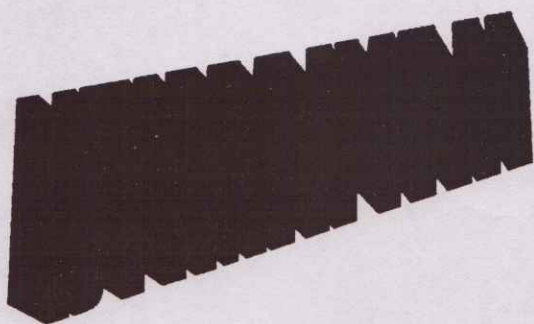
ISSN 2541-660X

# IJTIMAIYAH

Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya



Diterbitkan Oleh:  
PRODI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN  
UIN SUMATERA UTARA MEDAN



Jurnal Pendidikan IPS  
Vol. III No. 2 Juli-Desember 2019

Penanggung Jawab : Dr. Amiruddin Siahaan, M.Pd  
Pimpinan Umum : Dr. Masganti Sit, MA  
Penyunting/Editor : Syarbaini Saleh, S.Sos, M.Si  
Penyunting/Editor : Prof. Dr. Dede Sugandi, M.Pd (UPI)  
Penyunting/Editor : Dr. Irwan Abbas, M.Pd (Ibn. Khaldun Ternate)  
Penyunting/Editor : Dr. Bambang Subiyanto, M.Hum (ULM)

Fotografer:  
Torkis Dalimunthe, S.Pdi, M.Pd

Desain grafis:  
Sahlan, M.Pd

Sekretariat:  
Rinal Arisandi, S.Pd

**DITERBITKAN OLEH:**  
**Program Studi Pendidikan IPS**  
**Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**  
**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan**  
Jl. Williem Iskandar Psr V Medan Estate-Medan 20731  
Telp. 061-6622925-Fax. 061-6615683

## DAFTAR ISI

- Fakhtur Rohman, MA.** (TEORI BELAJAR ELABORASI) hal. 1-17.
- Sholihatul Hamidah Daulay** (FORMS AND FUNCTIONS OF COMMUNICATION IN SOCIETY) Hal. 18-27.
- Silvia Tabah Hati M.Si** (PROSES-PROSES PERUBAHAN SOSIAL DAN KEBUDAYAAN) hal. 28-46.
- Budi, S.Pd.I, M.Pd.I** (PENDIDIKAN ISLAM SEJAK AWAL ABAD Ke-20 SAMPAI TAHUN 1945) hal.47-63
- Henni Endayani** (KONSEP DASAR SOSIOLOGI PENDIDIKAN) hal.64-73

## PENDIDIKAN ISLAM SEJAK AWAL ABAD Ke-20 SAMPAI TAHUN 1945

Budi, S.Pd.I, M.Pd.I

### PENDAHULUAN

Pada awal abad ke-20 Indonesia, munculnya upaya-upaya pembaruan yaitu pertama, dalam bidang materi yang tidak hanya semata-mata berorientasi kepada mata pelajaran agama, akan tetapi juga dimasukkan mata pelajaran umum. Kedua, dalam bidang metode ini tidak lagi mengajarkan metode dalam membaca kitab dan hafalan, akan tetapi mengubah sistem nonklasikal menjadi klasikal. Sejalan dengan ini pemantapan administrasi pendidikan pun secara berangsur mulai dilaksanakan.<sup>1</sup>

Pada abad pertengahan abad ke-20, dunia Islam bangkit memerdekakan negerinya dari penjajah Barat. Pada periode ini mulai bermunculan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam Islam. Adapun latar belakang munculnya pemikiran-pemikiran pembaharuan tersebut dilatarbelakangi oleh, *pertama*, timbulnya kesadaran di kalangan para ulama bahwa banyak ajaran-ajaran "asing" yang masuk dan diterima sebagai ajaran Islam. *Kedua*, mondominasinya barat pada bidang politik dan kebudayaan, sehingga menyadarkan para kalangan ulama atau tokoh-tokoh Islam, bahwa Islam sangat jauh ketinggalan dari mereka. Memaksa mereka untuk bangkit dan mencontoh Barat dalam masalah-masalah politik dan peradaban untuk menciptakan *balance of power*.<sup>2</sup>

Pada tahun 1938-1945 terjadi Perang Dunia II antara Jerman, Itali, dan Jepang berhadapan dengan Sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis, Rusia, ditambah Amerika. Sebagai penjajah Jepang jauh lebih kejam dari pada Belanda, dilihat dari hal itu Jepang sebenarnya lebih kafir daripada Belanda, karena

---

<sup>1</sup>Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 35.

<sup>2</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 173-174.

Belanda masih tergolong kafir kitabi.<sup>3</sup> Dalam sistem pendidikan Jepang me-Nippon-kan bangsa Indonesia adalah melalui pendidikan.

#### A. Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia

Tersebarnya Islam ke Indonesia adalah melalui sebagai berikut:

- a. Perdagangan
- b. Dakwah
- c. Perkawinan
- d. Pendidikan
- e. Tasawuf dan tarekat
- f. Kesenian

Melalui penyebaran beberapa faktor di atas maka Islam berangsur-angsur menyebar melalui beberapa tahapan, yaitu:<sup>4</sup>

1. *Pertama*, pada tahap ini pedagang, ulama-ulama guru tarekat (wali di Jawa) dengan murid-murid mereka memegang peranan penting. Yang dimana penyebaran Islam masih relatif di kota pelabuhan. Mereka memperoleh *patronese* dari penguasa lokal yang juga banyak berperan dalam upaya penyebaran agama Islam. Islamisasi tahap ini sangat diwarnai dengan aspek tasawuf, karena tasawuf dengan segala penafsiran mistiknya terhadap Islam dalam beberapa segi tertentu "cocok" dengan latar belakang masyarakat setempat yang dipengaruhi *asketisme/zuhud* (mendekatkan diri pada Tuhan dan meninggalkan kelezatan duniawi) Hindu-Budha dan *sinkretisme* (perpaduan) kepercayaan lokal. Juga karena para tarekat-tarekat sufi cenderung bersifat toleran terhadap pemikiran dan praktik tradisional, walaupun sebenarnya bertentangan dengan praktik ketat *unitalirianisme* (pemerintahan pusat) Islam. Islam pada mulanya relatif di kota pelabuhan menjadi ibukota kerajaan, seperti Samudra Pasai, Malaka,

<sup>3</sup>Nourouzzaman Siddiqi, *Menguak Sejarah Muslim, Suatu Kritik Metodologis* (Yogyakarta: PLP2M, 1984), h. 124.

<sup>4</sup>Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 12-17.

dan kota-kota pelabuhan pesisir Jawa. Istana kerajaan menjadi pusat pengembangan intelektual Islam yang disusul dengan kemunculan tokoh-tokoh ulama semacam Hamzah Fansuri, Samsuddin Sumatrani, Nuruddin al-Raniri, Abd Rauf Singkel di kerajaan Aceh dan Wali Songo di kerajaan Demak. Semua tokoh ini mempunyai jaringan keilmuan yang luas baik di dalam maupun di luar negeri. Kota pelabuhan yang juga menjadi istana kerajaan yang kemudian berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam didatangi murid-murid yang nantinya akan menjadi da'i-da'i yang menyebarkan Islam ke daerah-daerah lain.

- *Kedua*, penyebaran Islam ketika terbentuknya perseroan<sup>5</sup>VOC(*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) yaitu pada bulan Maret 1602, perseroan-perseroan dalam usaha dagang dan berlayar ke Indonesia yang ikut bergabung dan disahkan oleh *Staten-General* Republik dengan satu piagam yang memberi hak khusus kepada perseroan gabungan tersebut untuk berdagang, berlayar.<sup>6</sup> Campur VOC terhadap raja-raja di Jawa makin luas termasuk masalah keagamaan. Peranan ulama di keraton terpinggirkan. Sehingga membuat ulama ke luar dari keraton dan mengadakan perlawanan sambil *memobilisasi* (melakukan pergerakan) petani untuk membentuk pesantren dan melawan kolonial Belanda.<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Perseroan, dalam buku Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 373. Perairan Indonesia kedatangan orang Eropa yaitu, Belanda, Inggris, Denmark, dan Prancis. Pelaut-pelaut Belanda dan Inggris secara bergantian tiba di Indonesia dan biasanya pelaut Inggris mengikuti jejak Belanda. Jika orang Belanda berhasil mendirikan *loji* di suatu tempat, orang-orang Inggris segera mengikuti dengan mendirikan pula *loji* di dekatnya. *Loji* disini bisa dikatakan gedung besar atau markas kompeni.

<sup>6</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 234-235.

<sup>7</sup>Menurut Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 374. Tercatat sejarah Sekitar pada tahun 1618-1619, pihak Belanda menyerang Pangeran Wijayakrama dan dapat merebut Jayakarta; di atas runtuhnya kota tersebut dibangun sebuah kota baru yang diberi nama Batavia. Banten yang menganggap dirinya berkuasa atas Jayakarta tentu tidak tinggal diam, sehingga sejak itu timbullah permusuhan terus-menerus antara Banten dengan Belanda di Batavia, baik berupa perang dingin maupun perang sebenarnya. Juga menurut Taufik Abdullah dalam bukunya yang berjudul *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam "Asia Tenggara"* menjelaskan bahwa adanya gerakan pemberontakan sejak abad ke-19 hingga abad ke-20, pemberontakan sosial yang sebagian besar bertolak dari keprihatinan agama, tercatat dalam periode itu beberapa peristiwa pemberontakan melawan pemerintah kolonial, antara lain yang terkenal: Gerakan Rifaiyah Kalisasak, Jawa Tengah (1867); Perlawanan Rakyat Banjar, Kalimantan Selatan (1862); Peristiwa

■ *Ketiga*, Pada awal abad ke-20, ketika terjadi liberalisasi kebijaksanaan pemerintah Belanda. Ketika pemerintah Belanda mengalami defisit (kekurangan anggaran) yang tinggi akibat menanggulangi tiga perang besar (perang Diponegoro, perang Paderi, dan perang Aceh) Belanda mengangkat Gubernur Jenderal *Johanes van den Bosch* memperkenalkan sistem *tanam paksa* (*cultuur stelsel*) yang mengharuskan petani membayar pajak dalam bentuk hasil pertanian yang dipaksakan. mulailah rakyat berkenalan dengan berbagai tanaman untuk perdagangan internasional, sehingga terjadi revolusi ekonomi di Jawa. Ekonomi uang diperkenalkan, yaitu dengan didirikan pabrik-pabrik. Sistem ekonomi yang disebut ekonomi liberal ini dimulai tahun 1870. Pada masa ini kekuasaan elit lokal merosot hanya sebagai mandor penanaman. Untuk keperluan ekonomi liberal prasarana fisik bangunan, perkebunan besar, irigasi, transportasi kereta api di Jawa dan Sumatra, pengangkutan laut, pelabuhan-pelabuhan baru, dibangun Tanjung Periuk (1893). Dan dibangun pula sarana non-fisik berupa sarana pendidikan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian Belanda. Kondisi ini menimbulkan orientasi politik etis tahun 1901 dengan slogan kaum liberal: meningkatkan kemakmuran dan kemajuan rakyat tanah jajahan.<sup>8</sup>

### B. Perkembangan Pendidikan Islam di Nusantara

Secara kronologis dapat disebutkan bahwa dalam wilayah kepulauan nusantara, hanya agama Hindu dan Budha yang dahulu dipeluk oleh masyarakat, terutama di pulau Jawa. Ketika penyebaran agama Islam lewat jalur perdagangan sampai di kepulauan Nusantara, maka proses perubahan pemeluk (conversi)

---

Haji Hasan, Garut, Jawa Barat (1919); Pemberontakan Petani Banten (1888); dan Gerakan Sarekat Islam lokal di beberapa wilayah di Hindia Belanda (1916-1920). Juga Syaikh Yusuf al-Makassari, yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial.

<sup>8</sup>Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 15.

agama secara bertahap berlangsung. Ketika itu, Islam bukannya agama terakhir yang masuk di wilayah kepulauan Nusantara.<sup>9</sup>

Pada awal abad ke-20 Indonesia telah diwarnai ide-ide pembaruan pemikiran Islam, dan juga mewarnai dunia pendidikan. Salah satu contoh dari pembaruan pendidikan itu adalah munculnya upaya-upaya pembaruan dalam bidang materi dan metode. Dampak dari munculnya ide-ide pembaruan dalam pendidikan, memunculkan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tidak lagi berorientasi pilah antara ilmu agama dan umum, dan menganggap kedua ilmu tersebut penting.<sup>10</sup>

### **Pendidikan Islam Masa Pemerintah Belanda**

Akibat dari ide-ide pembaruan dalam pendidikan oleh para kalangan ulama, maka lahirlah lembaga-lembaga pendidikan Islam yaitu di kalangan sekolah-sekolah agama yang disebut madrasah, pertama kali muncul di Sumatera Barat. Mereka (para ulama) memasukkan ilmu-ilmu umum ke dalam kurikulumnya. Kemudian pada kalangan sekolah-sekolah umum yang diasuh oleh organisasi Islam<sup>11</sup>, yang memasukkan mata pelajaran agama. Pristiwa inilah yang menjadi dasar bagi pengembangan penyatuan kedua ilmu ini untuk seterusnya.

Maka dapat diklasifikasikan bagaimana bentuk dan jenis lembaga pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ketika pada awal dan pertengahan abad ke-20, yaitu sebagai berikut:

- Lembaga pendidikan pesantren yang masih kental pada budaya dan tradisi pesantren, seperti hanya mengajarkan kitab-kitab klasik.
- Lembaga pendidikan sekolah-sekolah Islam, di lembaga ini selain mengajarkan ilmu-ilmu agama juga mengajarkan ilmu-ilmu umum.
- Lembaga pendidikan madrasah, lembaga ini mencoba memadukan sistem pesantren dan sekolah, dengan cara

---

<sup>9</sup>Amin Abdullah, *Studi Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h.5.

<sup>10</sup> Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 35-36.

<sup>11</sup>Organisasi Islam: HIS, MULO, AMS.



menampilkan sistem baru. Maksudnya ada yang diambil dari unsur pesantren ada yang juga diambil dari unsur sekolah.<sup>12</sup>

Pemerintah Hindia Belanda memiliki sikap netral terhadap pendidikan agama di sekolah-sekolah umum, dinyatakan dalam Pasal 179 (2) I.S (*Indische Staatsregeling*) dan dalam berbagai ordonansi.<sup>13</sup> Secara singkat dinyatakan sebagai berikut: Pengajaran umum adalah netral, artinya bahwa pengajaran itu diberikan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing. Pengajaran agama hanya boleh diberikan di luar jam sekolah.<sup>14</sup>

Pemerintah Belanda mendirikan lembaga-lembaga pendidikan bagi bangsa Indonesia, terutama pada kalangan bangsawan, yang sekaligus mengarahkan kepada westernisasi.<sup>15</sup> Lebih melangkah ke arah dunia modern sehingga secara perlahan Indonesia menjadi bagian dari dunia modern. Para lulusan sekolah ini diharapkan atau dituntun untuk dapat menjadi partner, bisa berasosiasi dalam kehidupan sosial dan kebudayaan Belanda.<sup>16</sup>

Politik yang dijalankan pemerintah Belanda terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas yang beragama Islam sebenarnya didasari oleh adanya rasa ketakutan, rasa panggilan agamanya yaitu Kristen dan rasa kolonialismenya. Dengan begitu, mereka menerapkan berbagai peraturan kebijakan, diantaranya:

1. Pada tahun 1882 pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang mereka sebut *priesterraden*. Dari nasehat badan inilah, pada tahun 1905 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru yang isinya menyatakan bahwa orang yang memberikan pengajaran atau pengajian agama Islam harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintah Belanda.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 36.

<sup>13</sup> Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 16.

<sup>14</sup> Pemberitahuan atau penyampaian

<sup>15</sup> Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 387-388.

<sup>16</sup> Proses penyerapan kebudayaan atau adat-istiadat (gaya hidup) barat oleh orang timur, karena di bawa oleh orang barat yang datang ke timur atau oleh orang-orang timur yang pernah menetap ke negeri barat.

2. Tahun 1925 keluar lagi peraturan yang lebih ketat terhadap pendidikan agama Islam, yaitu tidak semua orang atau kiyai boleh memberikan pelajaran mangaji, terkecuali telah mendapat semacam rekomendasi atau persetujuan pemerintah Belanda.
3. Tahun 1932 keluar lagi peraturan yang isinya berupa kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izin atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda yang disebut Ordonansi Sekolah Liar (*will day school ordonantie*).<sup>17</sup>

### **1. Pendidikan Islam Sebelum Tahun 1900**

Sebelum tahun 1900, kita mengenal pendidikan Islam secara perseorangan, melalui rumah tangga dan surau/langgar atau masjid. Pendidikan secara perseorangan dan rumah tangga itu lebih mengutamakan pelajaran praktis, misalnya tentang ketuhanan, keimanan, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah. Belum ada pemisahan mata pelajaran tertentu dan pelajaran yang diberikan pun belum sistematis.<sup>18</sup>

Pendidikan Islam pada masa ini bercirikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelajaran yang diberikan satu demi satu;
- b. Pelajaran ilmu sharaf didahulukan dari ilmu nahwu;
- c. Buku pelajaran pada mulanya dikarang oleh ulama Indonesia dan diterjemahkan ke dalam bahasa daerah setempat;
- d. Kitab yang digunakan umumnya ditulis tangan;
- e. Pelajaran suatu ilmu hanya diajarkan dalam satu macam buku saja;
- f. Toko buku belum ada, yang ada hanyalah menyalin buku dengan tulis tangan;
- g. Karena terbatasnya bacaan, materi ilmu agama sangat sedikit;

---

<sup>17</sup> Enung K Rukiati, Fenti Hikmawati, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 57-58.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 58.

- h. Belum lahir aliran baru dalam Islam.<sup>19</sup>

## 2. Pendidikan Islam pada Masa Peralihan (1900-1908)

Lembaga-lembaga pendidikan Islam sebelum tahun 1900 masih relatif sedikit dan berlangsung secara sederhana. Setelah itu, dalam periode yang disebut peralihan ini telah banyak berdiri tempat pendidikan Islam terkenal di Sumatera, seperti Surau Parabek Bukit Tinggi (1908) yang didirikan oleh Syekh H. Ibrahim Parabek dan di Pulau Jawa seperti Pesantren Tebuireng, namun sistem madrasah belum dikenal.<sup>20</sup>

Adapun pelajaran agama Islam pada peralihan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelajaran untuk 2 sampai 6 ilmu dihimpun secara sekaligus;
- b. Pelajaran ilmu nahwu di dahulukan atau disamakan dengan ilmu sharaf;
- c. Semua buku pelajaran merupakan karangan ulama Islam kuno dan dalam bahasa Arab;
- d. Semua buku dicetak;
- e. Suatu ilmu diajarkan dari beberapa macam buku; rendah, menengah, dan tinggi.
- f. Telah ada toko buku yang memesan buku-buku dari Mesir atau Mekkah.
- g. Ilmu agama telah berkembang luas berkat banyaknya buku bacaan.
- h. Aliran baru dalam Islam seperti yang dibawa oleh majalah Al-Manar di Mesir mulai lahir.<sup>21</sup>

Pada waktu itu kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam Indonesia sangat ketat. Disamping itu, juga pemerintah kolonial genjar mempropagandakan pendidikan yang mereka kelola, yaitu pendidikan

---

<sup>19</sup> Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Mutiara, 1985), h.62.

<sup>20</sup> Enung K Rukiati, Fenti Hikmawati, *Sejarah.....*, h. 59.

<sup>21</sup> *Ibid.*

yang membedakan antara golongan periyayi atau pejabat bahkan yang beragama Kristen.

### **3. Pendidikan Islam Sesudah Tahun 1909**

Isu Nasionalisme yang merambah kemana-mana berkat tampilnya Budi Utomo pada tahun 1908, yang menyadarkan bangsa Indonesia, bahwa perjuangan yang selama ini cuma mengandalkan kekuatan dan kedaerahan tanpa memperhatikan persatuan sulit untuk mencapai keberhasilan. Karena itulah, sejak tahun 1908 timbul kesadaran baru dari bangsa Indonesia untuk memperkuat kesatuan. Sistem madrasah baru dikenal pada permulaan abad 20 sistem ini membawa pembaharuan antara lain:

1. Perubahan sistem pengajaran dari perseorangan atau sorogan menjadi klasikal.
2. Pengajaran pengetahuan umum disamping pengetahuan agama dan bahasa arab.<sup>22</sup>

### **Pendidikan Islam Masa Pemerintah Jepang**

Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 menduduki Tarakan, Kalimantan Timur, kemudian terus memasuki daerah-daerah lain di Indonesia (Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Sumatera dan daerah lain). Dan dalam tempo yang sangat singkat telah menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda. Situasi dan keadaan pada waktu itu adalah berada dalam suasana perang dunia kedua, yang sudah barang tentu mendatangkan pengaruh yang tidak sedikit dalam berbagai aspek, termasuk diantaranya pendidikan.<sup>23</sup>

Jepang mempunyai tujuan untuk me-Nippon-kan Indoesia. Kalau Belanda menjadikan bangsa Indonesia *Inlander* (penduduk kelas dua), Jepang ingin menghilangkan kebangsaan Indonesia menjadi Nippon. Untuk mempercepat usaha itu segala cara ditempuh, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 60.

<sup>23</sup>Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), h. 36-38.

- Membersihkan kebudayaan Barat, kebudayaan Islam diganti dengan kebudayaan Jepang. Langkah yang pertama adalah menjadikan bahasa Jepang sebagai *lingua franca* (bahasa resmi). Setelah peresmian itu, setiap penerbitan koran sengaja disediakan kolom pelajaran Jepang, buku-buku teks pelajaran memakai bahasa Jepang. Madrasah yang bahasa pengantarnya bahasa Arab ditutup, bahasa Arab dan huruf Arab dilarang diajarkan di pesantren, walaupun akhirnya larangan itu dicabut akibat kerasnya tantangan umat Islam.<sup>24</sup>
- Mengubah sistem pendidikan. Yaitu dengan membuat kurikulum baru. Oleh sebab itu, Jepang menguasai kurikulum yang berlaku secara umum untuk semua sekolah (sebelum masing-masing sekolah mempunyai kurikulum sendiri-sendiri, sekolah Islam, sekolah Taman Siswa, sekolah Zending, sekolah Cina, dan lain-lain). Dalam kurikulum baru ini bahasa Indonesia menjadi pelajaran utama dan bahasa Jepang menjadi pelajaran wajib. Para pelajar harus mempelajari adat istiadat Jepang *taiso*<sup>25</sup>, melagukan lagu kebangsaan Jepang, nyanyian-nyanyian Jepang, melakukan *seikeirei* (penghormatan) ke arah istana Kaisar Tokyo. Guru-gurunya juga harus dilatih, sehingga menjadi guru yang dapat melakukan tugas-tugas yang dibebankan oleh pemerintahan militer Jepang, di samping itu diberi pelajaran tentang dasar-dasar pertahanan dan kemiliteran. Tidak heran apabila sekolah pada zaman itu merupakan *pilot project* untuk melatih dan mengindoktrinasi pelajar.<sup>26</sup>
- Membentuk barisan muda. Jepang melatih dan memobilisasi pemuda dan santri dengan latihan perang memakai senjata

---

<sup>24</sup>Nourouzzaman Siddiqi, *Menguak Sejarah Muslim, Suatu Kritik Metodologis* (Yogyakarta: PLP2M, 1984), h. 126.

<sup>25</sup>Pendidikan Jasmani Jepang

<sup>26</sup>Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia IV* (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), h. 174.

menengah aktif sekitar 5% (Poesponegoro, 1984, jilid VI, 51). Di samping membuka sekolah-sekolah yang pernah diasuh oleh Belanda, Jepang juga mengizinkan untuk membuka sekolah-sekolah yang diasuh badan-badan swasta, termasuk di antaranya sekolah-sekolah Islam.

Sekolah-sekolah yang ada pada zaman Belanda diganti dengan sekolah Jepang. Segala daya upaya ditujukan untuk kepentingan perang. Murid-murid hanya mendapat pengetahuan sedikit sekali. Hampir sepanjang hari, mereka mengikuti kegiatan latihan perang atau bekerja. Kegiatan-kegiatan sekolah antara lain:

1. Mengumpulkan batu, pasir untuk kepentingan perang;
2. Membersihkan bengkel-bengkel, sarana-sarana militer;
3. Menanam ubi-ubian, sayur-sayuran di pekarangan sekolah untuk persediaan makanan;
4. Menanam pohon jarak untuk bahan pelumas.<sup>31</sup>

#### **1. Sikap Jepang terhadap Pendidikan Islam**

Sikap penjajah Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata lebih lunak sehingga ruang gerak pendidikan Islam lebih bebas dibanding pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Untuk mendekati umat Islam mereka menempuh kebijaksanaan sebagai berikut:

- a. Kantor Urusan Agama (KUA)

KUA yang dalam bahasa Jepang *Shumubu* (sebagai pengganti kantor *Voor Het Islandsche Zaken* yang sudah ada di zaman kolonial Belanda) yang dipimpin oleh ulama Islam yaitu K.H. Hasyim Asy'ari dari Jombang sejak tanggal 01 Agustus 1944, dan sejak tanggal 01 April 1944, dimulainya pembentukan *Shumubu* di daerah-daerah atau di setiap keresidenan.

- b. Pembentukan Masyumi

Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dipandang sebagai pengganti MIAI. Pembubaran MIAI pada bulan oktober 1943 dilakukan Jepang karena organisasi ini berdiri atas prakarsa kaum muslimin sendiri sebagai suatu

menengah aktif sekitar 5% (Poesponegoro, 1984, jilid VI, 51). Di samping membuka sekolah-sekolah yang pernah diasuh oleh Belanda, Jepang juga mengizinkan untuk membuka sekolah-sekolah yang diasuh badan-badan swasta, termasuk di antaranya sekolah-sekolah Islam.

Sekolah-sekolah yang ada pada zaman Belanda diganti dengan sekolah Jepang. Segala daya upaya ditujukan untuk kepentingan perang. Murid-murid hanya mendapat pengetahuan sedikit sekali. Hampir sepanjang hari, mereka mengikuti kegiatan latihan perang atau bekerja. Kegiatan-kegiatan sekolah antara lain:

1. Mengumpulkan batu, pasir untuk kepentingan perang;
2. Membersihkan bengkel-bengkel, sarana-sarana militer;
3. Menanam ubi-ubian, sayur-sayuran di pekarangan sekolah untuk persediaan makanan;
4. Menanam pohon jarak untuk bahan pelumas.<sup>31</sup>

#### **1. Sikap Jepang terhadap Pendidikan Islam**

Sikap penjajah Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata lebih lunak sehingga ruang gerak pendidikan Islam lebih bebas dibanding pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Untuk mendekati umat Islam mereka menempuh kebijaksanaan sebagai berikut:

##### **a. Kantor Urusan Agama (KUA)**

KUA yang dalam bahasa Jepang *Shumubu* (sebagai pengganti kantor *Voor Het Islanddsche Zaken* yang sudah ada di zaman kolonial Belanda) yang dipimpin oleh ulama Islam yaitu K.H. Hasyim Asy'ari dari Jombang sejak tanggal 01 Agustus 1944, dan sejak tanggal 01 April 1944, dimulainya pembentukan *Shumubu* di daerah-daerah atau di setiap keresidenan.

##### **b. Pembentukan Masyumi**

Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dipandang sebagai pengganti MIAI. Pembubaran MIAI pada bulan oktober 1943 dilakukan Jepang karena organisasi ini berdiri atas prakarsa kaum muslimin sendiri sebagai suatu

---

<sup>31</sup> Enung K Rukiati, Fenti Hikmawati, *Sejarah.....*, h. 61.

federasi organisasi-organisasi Islam. Masyumi aktif tanggal 01 Desember 1943 merupakan ciptaan pejabat-pejabat dari Jepang, lebih bersifat politik untuk memperkuat kesatuan seluruh organisasi Islam dan membantu Dai Nippon untuk kepentingan Asia Timur Raya.

c. Terbentuknya Hizbullah

Hizbullah merupakan sejenis organisasi militer bagi pemuda-pemudi Islam. Pembentukan Hizbullah pada akhir tahun 1944 sangat penting karena banyak anggotanya yang kemudian menjadi anggota tentara nasional. Pendidikan Islam khususnya dan pendidikan Indonesia pada umumnya di masa pendudukan Jepang mengalami kemunduran yang luar biasa, terutama di bidang pendidikan secara umum hal ini karena ketatnya pengaruh indoktrinasi serta disiplin mati pendidikan militerisme fasisme Jepang.<sup>32</sup>

**2. Pertumbuhan dan Perkembangan Madrasah**

Pada masa pendudukan Jepang sekolah-sekolah telah diseragamkan dan dinegerikan adapun sekolah-sekolah swasta, seperti Muhammadiyah, Taman Siswa dan lain-lain diizinkan terus berkembang, tetapi tetap diatur oleh pendudukan Jepang.<sup>33</sup>

**Pendidikan Islam Pada Masa Kemerdekaan**

Setelah merdeka pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik sekolah negeri maupun swasta. Terlihat dengan pemberian bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945 yang menyebutkan bahwa madrasah dan pesantren adalah satu alat dan sumber pendidikan yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia, hendaklah mendapat perhatian dan bantuan material dari pemerintah.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 60-63.

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 65.

<sup>34</sup>*Ibid.*



Sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kehidupan beragama di Indonesia secara Konstitusional dijamin keberadaannya sebagaimana pada pasal 29 UUD 1945 yaitu:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) pertama Ki Hajar Dewantara mengeluarkan instruksi yang memerintahkan semua kepala sekolah dan guru untuk:

1. Mengibarkan sang merah putih tiap hari di halaman sekolah.
2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
3. Menghentikan pengibaran bendera Jepang dan menghapuskan nyanyian *kimigayo*, lagu kebangsaan Jepang.

Pendidikan Islam di Indonesia pascapenjjajaan (masa kemerdekaan) dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Pendidikan Islam sebagai lembaga

Pendidikan Islam sebagai lembaga adalah tumbuh, dan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti, pesantren, sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Eksistensi dan keberadaan pesantren pada masa kemerdekaan semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pesantren yang sudah tumbuh ratusan tahun di Indonesia pada era kemerdekaan tetap mendapat tempat untuk berkembang. Pesantren-pesantren yang mengikuti aturan dari pemerintah terutama dari segi kurikulum yang diajarkan diberi hak untuk mengikuti ujian yang setara dengan negeri. Sedangkan kalau dilihat dari sudut pertumbuhan kuantitasnya cukup menggembirakan, karena banyak pesantren baru yang timbul di Indonesia.

Kendatipun pesantren seluruhnya itu dikelola oleh swasta, pemerintah tetap memperhatikan pesantren dengan memberikan bantuan dalam hal pembinaan dan pendanaan di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama,

walaupun kondisi pemerintah pada saat itu dalam keadaan kemampuan terbatas.

Keberadaan sekolah sebagai lembaga pendidikan Islam adalah disebabkan keterkaitan sekolah dengan dilaksanakannya pelajaran agama. Setiap sekolah baik negeri maupun swasta wajib mengajarkan mata pelajaran agama di sekolahnya. Secara garis besar sekolah dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang *pertama*, sekolah swasta, dimana dibagi menjadi dua, sekolah Islam dan sekolah non-Islam. *Kedua*, adalah sekolah negeri.

Sekolah-sekolah Islam memprogramkan pendidikan agama Islam dengan jumlah jam pelajaran yang bervariasi, akan tetapi jumlah jamnya tetap lebih banyak daripada jumlah jam pelajaran agama yang diajarkan dari sekolah-sekolah negeri.

Sedangkan keberadaan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam agak lebih memiliki spesifikasi bila dibandingkan dengan dua macam lembaga pendidikan yang disebutkan di atas. Kekhususannya terletak pada pemerintah dalam hal ini Departemen Agama banyak mengasuh madrasah negeri. Pemerintah menyediakan sarana dan fasilitas, baik gedung, guru-guru dan lainnya. Pada tahun 1975 diberlakukannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri) yaitu madrasah memiliki persamaan dan kedudukan yang setara dengan sekolah, sehingga disebut madrasah itu adalah sekolah yang berciri khas agama Islam. Pada tahun 1945 didirikannya Sekolah Tinggi Islam, tepatnya di Jakarta. Kemudian STI ini pindah ke Yogyakarta dan berubah menjadi Universitas Islam Indonesia yang salah satu Fakultasnya adalah Fakultas Agama. Pada tahun 1950 Fakultas Agama tersebut dijadikan statusnya menjadi negeri, yaitu PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri). Kemudian pada tahun 1960 PTAIN digabung dengan ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama) di Jakarta yang menjadi IAIN (Institut Agama Islam Negeri). Hingga sampai saat ini jumlahnya ada 12 buah di seluruh Indonesia dan 6 Universitas Islam Negeri (UIN). Selain dari IAIN dan UIN ada pula sejumlah 35 STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri). Kemudian

selain dari Perguruan Tinggi Islam Negeri, ada juga Perguruan Tinggi Islam Swasta, baik dalam bergabung dalam UIS (Universitas Islam Swasta) maupun yang berbentuk STAIS (Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta).

b. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran

Yang dimaksud dengan pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yaitu, dimasukkannya mata pelajaran agama ke sekolah-sekolah sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri disamping mata pelajaran lainnya. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran telah dimasukkan sekolah-sekolah sejak tahun 1946, sejak dimulainya pelajaran agama di sekolah-sekolah umum. Pendidikan agama tersebut secara bertahap mengalami dinamika dan terakhir dicantumkan dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendidikan agama adalah hak peserta didik. "Setiap peserta didik dalam satuan pendidikan berhak; (a) mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, dan diajarkan oleh pendidik yang seagama" ( Pasal 12 Ayat a).<sup>35</sup>

### C. Penutup

Pendidikan Islam sejak awal abad ke-20 di Indonesia, dimulai dari munculnya pembaruan dalam hal materi pelajaran agama, dan metode yang tidak lagi mengajarkan penghafalan juga melakukan pembaruan pemantapan administrasi secara bertahap.

Pendidikan pada masa penjajahan, timbulnya atau bangkitnya kesadaran akan para ulama tentang kondisi Islam yang mulai ketinggalan, dikarenakan sudah mendominasinya barat di kancah bidang politik maupun kebudayaan.

Kemudian dengan Perang Dunia II, awalnya pergerakan bangsa Indonesia yang dijajah oleh Jepang, pendidikan Islam di zaman penjajahan Jepang terkait erat dengan saling membutuhkan antara jepang dan umat Islam di Indonesia.

---

<sup>35</sup> Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 17-19.

Jepang membutuhkan umat Islam Indonesia terkait dengan perang Asia Timur Raya, agar pihak Jepang mendapat bantuan dari umat Islam Indonesia.

## DAFTAR BACAAN

- Abdullah, Amin, *Studi Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Amin, Samsul Munir, *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Daulay, Haidar Putra, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Daulay, Haidar Putra, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Kartodirdjo, Sartono, *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka, 1977.
- Rukiati, Enung K; Hikmawati, Fenti, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Siddiqi, Nourouzzaman, *Menguak Sejarah Muslim, Suatu Kritik Metodologis*. Yogyakarta: PLP2M, 1984.
- Sunanto, Musyrifah, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara, 1985.